

SINERGITAS HUBUNGAN ANTARA DUNIA USAHA MEDIA, PEMERINTAH DAN LSM

**Putri¹, Ilham Tahier², Rani³, Miranti⁴, Anghrina Ananta Sudirman⁵,
Claudya Amal Utami⁶**

Prodi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah palopo
Email : putriputri12022004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi hubungan antara industri media, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Sinergitas menurut kamus besar bahasa Indonesia, “sinergi” bisa didefinisikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi juga bisa dimaknai sebagai bentuk kerja sama yang dihasilkan melalui kalaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Media *Relation* atau bisa juga disebutkan Relasi Media merupakan kegiatan menjalin hubungan/relasi dengan media massa, wartawan atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi, yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan atau message dalam media massa itu sendiri buat menjaga kesan positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), LSM adalah lembaga organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Organisasi ini didirikan oleh perorangan maupun kelompok dan tidak menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi, atau negara, Evolusi paradigma pembangunan, dimana pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam pembangunan, berimplikasi pada pengelolaan sinergi. Peneliti berupaya untuk mengenali peran aktor dan kolaborasi dalam membentuk kolaborasi dalam pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin melakukan analisis terkait pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance*. Hal-hal di atas dalam konteks penelitian mendasari keinginan peneliti untuk menyelidiki dan mendeskripsikan kegiatan hubungan media Bank Indonesia di Jawa Barat melalui konferensi pers secara detail yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tentu saja hal ini untuk membangun hubungan baik dengan media. Anda dapat meningkatkan dan mempertahankan citra fasilitas Anda. Di sisi lain, penerapan tata kelola kolaboratif memerlukan komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi kolaborasi antar aktor sehingga perannya dalam membangun hubungan dengan dunia usaha.

Kata-kata Kunci: Dunia usaha media, pemerintah dan LSM

SYNERGY OF RELATIONSHIPS BETWEEN THE MEDIA BUSINESS WORLD, GOVERNMENT AND NGOS

Abstract

This study aims to analyze the synergy of relationships between the media industry, the government and non governmental organization. Synergy According to the great Indonesian dictionary, "synergy" can be defined as a joint activity or operation. Synergy can also be interpreted as a form of cooperation produced through the collaboration of each party without any feeling of defeat. Media Relations or it can also be called Media Relations is an activity to establish relationships/relations with the mass media, journalists or the press to establish cooperation and good relations by an organization, which will later affect the news or message in the mass media itself to maintain a positive impression of an organization under its auspices. According to the Great Dictionary of the Indonesian Language (KBBI), non governmental organization are organizational institutions that aim to fight for the interests of the community. This organization is founded by individuals or groups and is not part of the government, bureaucracy, or state, the evolution of the development paradigm, where the government is no longer the only actor in development, has implications for synergy management. The researcher seeks to recognize the role of actors and collaboration in forming collaboration in development. This study uses an exploratory research method using a qualitative approach. Through this study, the researcher wants to conduct an analysis related to the development of tourism villages based on collaborative governance. The above in the context of the research underlies the researcher's desire to investigate and describe Bank Indonesia's media relations activities in West Java through a detailed press conference conducted by Bank Indonesia. Of course, this is to build a good relationship with the media. You can improve and maintain the image of your facility. On the other hand, the implementation of collaborative governance requires effective communication to facilitate collaboration between actors so that their role in building relationships with the business world is important.

Keywords: Media business, government and NGOs

PENDAHULUAN

Pemberdayaan UKM (usaha kecil menengah) yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk memperkuat UKM (usaha kecil menengah). Usaha kecil dan menengah diharapkan menjadi kuat dan mandiri serta berkembang menjadi usaha menengah. Usaha kecil dan menengah yang kuat, mandiri dan maju secara otomatis meningkatkan produksi dalam negeri, kesempatan kerja, ekspor, dan pemerataan hasil pembangunan, yang pada akhirnya meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Selain itu, pemberdayaan usaha kecil dan menengah akan meningkatkan status dan perannya dalam perekonomian nasional serta menciptakan tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kuat. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah untuk membina dan memperkuat usaha kecil dan menengah.(Maulana 2019)

Selain sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat daerah, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperhatikan guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi UKM (usaha kecil menengah). Dalam proses perencanaan pembangunan, aspek transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan untuk mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan

pembangunan di tingkat daerah. (Maulana, 2019)

Lembaga dan organisasi informal dapat diberikan ruang untuk menentukan arah pembangunan agar mereka merasakan dan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan, pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ciri tata pemerintahan yang baik: akuntabilitas, yang berarti para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang terlibat. Artinya masyarakat (pemerintah), dunia usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan publik.(Maulana 2019)

Sinergitas menurut kamus besar bahasa Indonesia, "sinergi" bisa didefinisikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi juga bisa dimaknai sebagai bentuk kerja sama yang dihasilkan melalui kalaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. *Media Relation* atau bisa juga disebutkan Relasi Media merupakan kegiatan menjalin hubungan/relasi dengan media massa, wartawan atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi, yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan atau message dalam media massa itu sendiri buat menjaga kesan positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), LSM adalah lembaga organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Organisasi ini didirikan oleh perorangan maupun kelompok dan tidak menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi, atau negara. Perlu diperhatikan bahwa di dalam LSM terdapat asas sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh laba yang besar. Oleh karena itu, hampir sebagian besar kegiatan LSM tidak bertujuan untuk mencari “profit pribadi”. adapun pengertian lain dari sinergitas, sinergitas merupakan komitmen bersama dalam melayani masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memerlukan sinergi program antar pelaku pembangunan daerah. Pemerintah daerah memainkan peran mediasi, pengarahan dan pengawasan, sementara organisasi sosial dan lembaga keagamaan bertindak sebagai mitra dan mempromosikan layanan kesejahteraan daerah. Untuk menghindari duplikasi program, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan perlu dikoordinasikan. Sinergi atau koordinasi program yang baik memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan kota secara lebih efektif dan efisien (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2014).

Banyak penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang pemanfaatan media usaha, pemerintah dan LSM yang akan

meningkatkan layanan dan juga akan meningkatkan kepuasan bagi semua orang. Sebutlah penelitian yang dilakukan terhadap karyawan, yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan media usaha, pemerintah dan LSM berpengaruh terhadap kepuasan orang. penelitian Sugandi pada tahun 2014 di 3 lokasi kampus perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari solusi permasalahan ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti swasta, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan pembangunan. (Maulana, 2019)

berbagai kepentingan menjadi penting karena tidak semua kegiatan pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri dan memerlukan keterlibatan pihak swasta, apalagi mengingat ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan finansial berperan penting dalam mendukungnya. Bentuk kerjasama antara badan swasta ini dikenal dengan istilah kemitraan publik-swasta. (Maulana, 2019)

analisis isi bertujuan untuk mengenali cara kerja media dalam menampilkan dan memilih berbagai isu yang sesuai dengan idealisme mereka. Sementara peneliti memilih analisis tematik untuk menjelaskan pengaruh

media, pemerintah dan LSM dan melihat praktik manajemen media, dalam menjaga kualitas idealisme dan mempertahankan eksistensinya di situasi tersebut. Teknik analisis data yang dipilih merupakan kebaruan (*novelty*) dalam studi peneliti. Tujuannya untuk menyelidiki latar belakang berdirinya media ini, mengetahui strategi manajemen media yang dilakukan serta kualitas karya. Studi ini menggunakan metode studi kasus dimana model manajemen media yang digunakan milik Sylvia M Chan dan Olmsted.

KAJIAN PUSTAKA

Pada dasarnya, media sosial merupakan evolusi terbaru dari teknologi pengembangan *web* baru berbasis internet yang memudahkan siapa saja untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, membentuk jaringan online, dan mendistribusikan konten mereka sendiri. Senada dengan pendapat Zarrella. (Sandi 2022)

Peran media adalah membantu pemerintah dalam hal sosialisasi dan publisitas agar kehadiran pemerintah tersosialisasikan dengan baik dalam melaksanakan program-programnya dan informasi mengenai program-program yang dilaksanakan pemerintah tercipta secara resmi dapat digunakan sebagai alat. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat sekitar mereka dengan sebaik-baiknya.

Media memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Yang tak kalah penting dalam pembangunan adalah sektor akademik. Ilmuwan merupakan aktor penting dalam merumuskan kebijakan dan program. Pengembangan dokumen ilmiah oleh para ilmuwan yang memberikan rekomendasi dan petunjuk bagi kebijakan dan program dalam format dan sistem yang diatur membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang berkualitas tinggi dibandingkan kebijakan yang tidak berbasis teori. (Kirana dan Artisa 2020)

Jika sinergi antara pemerintah dan dunia usaha melalui CSR berjalan baik, maka peningkatan kebahagiaan masyarakat lokal bisa semakin dipercepat.

Mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung program pemerintah, CSR mempunyai dampak yang signifikan dalam mendorong upaya pengentasan kemiskinan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan sumber daya nasional untuk memerangi kemiskinan masih terbatas, dan situasi ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dunia usaha. Tentu saja kegiatan CSR juga dapat menysasar kelompok masyarakat yang tidak terkena dampak program pengentasan kemiskinan, sehingga peningkatan kualitas hidup dapat dirasakan secara merata di seluruh masyarakat. (Komariah et al. 2018)

Sinergi kelompok kepentingan mungkin cocok sebagai landasan alternatif dalam mencapai percepatan dan implementasi program pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam inisiatif pengembangan ekonomi. (Rusyadi, Jumiati, dan Yulianti 2022)

Oleh karena itu, dalam kegiatan ini perusahaan dan pemerintah menghimbau adanya partisipasi aktif masyarakat dan perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. (Komariah et al. 2018)

Konsep sinergi memerlukan integrasi atau koordinasi antara berbagai fungsi dan bidang bisnis portofolio suatu perusahaan, sehingga struktur organisasi mekanisme, koordinasi, dan sistem perusahaan menjadi topik penting. (Rusyadi et al. 2022)

Selain itu David (2017) menambahkan bahwa manajemen strategis merupakan perpaduan antara seni dan ilmu yang merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional organisasi. Selanjutnya definisi ini menyiratkan pada fokus integrasi manajemen, pemasaran, keuangan, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, dan informasi sistem agar organisasi dapat mencapai tujuannya.

Peran masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat berkontribusi

dengan berpartisipasi aktif dalam mengungkapkan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas komunitas dimana program kemasyarakatan dapat dipadukan dengan program pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat merupakan bentuk implementasi program pemerintah. (Kirana dan Artisa 2020)

Sektor swasta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat lokal diharapkan dapat berperan sangat besar dalam pengembangan pariwisata. Pihak swasta berperan dalam pelaksanaan kegiatan agrowisata, khususnya dalam kegiatan pemasaran, penyediaan jasa dan operasional. (Kirana dan Artisa 2020)

Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) berfungsi sebagai wadah terciptanya program kemasyarakatan sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat dan sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan. Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah diharapkan dapat bekerja sama secara konstruktif untuk pengembangan agrowisata. (Kirana dan Artisa 2020)

Fungsi dari organisasi masyarakat (LSM) antara lain dapat menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan terhadap program pemerintah, khususnya penataan ruang kawasan agrowisata.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan memberikan pandangan, pendapat, kritik dan saran terhadap pedoman tata ruang kawasan agrowisata yang ada dan sedang berjalan, sehingga memberikan masukan yang baik untuk perbaikan di masa depan. (Kirana dan Artisa 2020)

Keterlibatan perusahaan dan komunitas sangatlah penting dan mutlak diperlukan. Kegiatan ini harus menghormati dan memadukan budaya lokal serta membawa manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan agar peluang dan kapasitas masyarakat lokal dapat berperan lebih besar. (Kirana dan Artisa 2020)

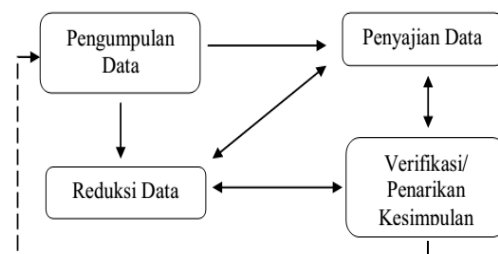
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin melakukan analisis terkait pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance*.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Moleong, 2017) terkait proses penelitian, peneliti mengawalinya dengan merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti menentukan metode yang tepat dan sesuai untuk memecahkan masalah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Lokasi penelitian

dalam penelitian ini adalah Kota Batu dan situs penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, observasi langsung ke lapangan serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, dokumen-dokumen perencanaan serta karya tulis seperti jurnal dan artikel ilmiah. Kemudian, analisis data dilakukan mencakup empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis yang mengacu meliputi (1) reduksi data; (2) penyajian/display data; (3) verifikasi atau penarikan kesimpulan. Secara skematis proses analisis data dapat dilihat pada gambar berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk sinergi dapat dicapai dengan keterlibatan seluruh elemen pemangku kepentingan. Dalam hal ini bisa berupa hubungan antara pemerintah dan

LSM, sumber pendanaan, perusahaan atau universitas sebagai lembaga penelitian. (Rachman dan Syamsuddin 2018)

Peran LSM tidak hanya pada tataran penelitian dan pengembangan konseptual/teoritis, namun juga harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya masyarakat dalam pengambilan keputusan. Organisasi *non*-pemerintah (LSM) memiliki keterampilan untuk mengembangkan metode dan pendekatan baru terhadap program penelitian dan pengembangan yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan aktor pembangunan lainnya. Organisasi *non*-pemerintah (LSM) diakui memiliki banyak keunggulan dibandingkan pemerintah di bidang tertentu. Salah satunya adalah kemampuan berinovasi. (Moh. Rafli Abbas 2016)

Dalam proses mempengaruhi kebijakan, hubungan antara LSM dan pemerintah tidak dapat dihindari beroperasi dalam konteks ruang politik untuk mencapai tujuan masing-masing partai. (Moh. Rafli Abbas 2016)

Dalam menjalin suatu hubungan, terkadang muncul tarik ulur kepentingan atau benturan ide sehingga berujung pada konflik dan mosi tidak percaya antara kedua pihak yang ada di ruangan ini. Namun dalam proses interaksi antar LSM,

mungkin perlu mengangkat isu-isu yang muncul di masyarakat, guna mengembangkan dan mempengaruhi kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat, guna mempengaruhi kebijakan di ruang politik. (Moh. Rafli Abbas 2016)

Dilihat dari hubungan LSM-pemerintah, ada lima faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan LSM-pemerintah. Artinya, pertama, faktor struktural dan politik diperkirakan muncul ketika sistem politik otoriter berubah menjadi sistem politik demokratis. Rezim mengabaikan perubahan dalam hubungan antara LSM dan pemerintah. strategi dan kebijakan pembangunan nasional juga mempengaruhi ruang politik yang tersedia bagi LSM, baik dalam kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan sektoral. (Moh. Rafli Abbas 2016)

Kedua, peraturan pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap hubungan dengan LSM. Undang-undang pemerintah yang berkaitan dengan peran LSM bersifat peraturan, termasuk pelaksanaan pendaftaran LSM, pemantauan dan pengaturan berbagai program keuangan dan kegiatan LSM. Selain itu, LSM yang hadir di perkotaan juga berperan dalam melawan menguatnya kontrol politik terhadap aktivitas pemerintah. (Moh. Rafli Abbas 2016)

Ketiga, memberikan ruang dan kemauan kepada unsur LSM, yakni kepribadian LSM. Sifat LSM mempengaruhi hubungannya dengan pemerintah, tergantung isu apa yang disejajarkan dengan pemerintah dalam proses politik. LSM yang bergerak dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik juga menjadi penting bagi pemerintah, yang mengawasi proses demokrasi negara. (Moh. Rafli Abbas 2016)

Keempat, strategi aktor. Strategi hubungan antara LSM dan pemerintah tidak dilihat dari perspektif dinamika kelembagaan. Di balik kebijakan pemerintah dan strategi LSM, terdapat aktor-aktor yang mempengaruhi hubungan keduanya, sehingga latar belakang sosial para aktor seperti kelas sosial dan etnis menjadi nilai-nilai mereka. Yang terpenting adalah menjaga hubungan tetap terbuka, dan pandangan bersama mempengaruhi jaringan hubungan. (Moh. Rafli Abbas 2016)

Kelima, hubungan antara LSM dan pemerintah di negara-negara berkembang tidak hanya dipengaruhi oleh sifat dan hubungan kekuasaan antara kedua pihak, namun juga oleh upaya untuk mendorong tata kelola yang baik oleh agen donor internasional yang berjejaring dengan LSM lokal. Kekuatan donor internasional mempunyai pengaruh penting dalam menentukan dinamika hubungan LSM-

pemerintah melalui penyesuaian struktural. (Moh. Rafli Abbas 2016)

Keterlibatan elemen masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), perlu lebih dikembangkan. Di era keterbukaan saat ini, LSM mampu menjaga hubungan baik dengan pemerintah karena bersifat independen, suportif, kooperatif, dan kolaboratif. LSM sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan merupakan elemen potensial menuju terbentuknya masyarakat sipil. Poin penting lainnya adalah penguatan masyarakat sipil, melalui upaya penguatan masyarakat akar rumput melalui berbagai operasi bantuan dan advokasi hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, untuk mengatasi ideologi radikal pemerintah, BNPT tidak cukup hanya berperan sendiri, namun juga perlu melibatkan LSM. (Supriadi, Ajib, dan Sugiarto 2020)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu lembaga atau organisasi yang beranggotakan suatu masyarakat yang didirikan secara sukarela untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan fokus pada tujuan sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut Ormas) didirikan

secara sukarela oleh masyarakat dan mempunyai kesamaan aspirasi bahwa organisasi mempunyai hal-hal seperti Keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan negara republik kesatuan yang berdasarkan Pancasila. (Nursamsiyah 2022)

Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi di luar pemerintahan atau birokrasi yang mempunyai misi mendukung kinerja pemerintah dalam kegiatan masyarakat sekaligus memantau kinerja pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Secara umum, peran organisasi *non*-pemerintah adalah menjadi lembaga yang memperkuat masyarakat demi kesejahteraan mereka sendiri. (Nursamsiyah 2022)

Lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 6, organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen.

- (a) Alokasi kegiatan menurut kepentingan anggota atau tujuan organisasi.
- (b) Melatih dan mengembangkan anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
- (c) mengkomunikasikan aspirasi masyarakat;
- (d) Penguatan Masyarakat.
- (e) Kinerja pelayanan sosial.

(f) partisipasi masyarakat untuk melindungi, melestarikan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

(g) menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi norma, nilai, dan etika kehidupan. (Nursamsiyah 2022)

Sinergi dalam kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat adalah hubungan dan interaksi antara komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat dimana masing-masing aktor saling bekerjasama dan menciptakan suatu kesatuan yang terkait, terpadu, serasi, dan seimbang. hubungan peran bekerja sama untuk mencapai tujuan kami dan bertujuan ke arah yang sama untuk mencapai tujuan kami. (Wahyuni 2014)

Sinergi kebijakan merupakan kerja sama dan sinkronisasi (koordinasi) antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan dengan pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai dampak kebijakan yang bermanfaat bagi mereka (kebijakan), dan proses harmonisasi (penyesuaian). Keuntungannya adalah: Kepentingan sosial (umum). (Satibi, Ediyanto, dan Vaugan 2023)

KESIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan Berdirinya sebuah lembaga swadaya masyarakat adalah sebagai sarana pemenuhan

kebutuhan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ini mampu memberikan perannya bagi masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Yayasan Pondok Rakyat sebagai salah satu dari sekian banyak lembaga swadaya masyarakat yang ada di Indonesia ini memberikan peran yang sangat besar dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi dan pembelaan hak-hak masyarakat. Peran Yayasan Pondok Rakyat dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat di kampung Bumen Paseko sangat penting. Dapat pula disimpulkan bahwa sinergitas sekolah, pemerintah dunia kerja dan masyarakat akan berdampak optimal jika peran kepala sekolah memiliki kompetensi kewirausahaan yang mumpuni sehingga mampu memanfaatkan semua sumber daya yang akan berdasarkan *cost benefit analysis* yang tepat dalam mengolah pendidikan list skill untuk siswa disabilitas.

kerjasama yang intensif disertai dengan perilaku kelompok dengan semangat belajar dan semangat inovatif mendorong terbentuknya kualitas sinergi. Dalam elaborasi lebih lanjut ditemukan bahwa intensitas kerjasama, perilaku belajar inovatif anggota kelompok, tergeser tingkat kepentingannya dengan sangat

nyata oleh rasa saling percaya yang ada dalam kelompok. Ini menunjukkan begitu besar pengaruhnya rasa saling percaya untuk membangun sinergi. Hal itu terbukti kembali, setelah dilakukan pendalaman di mana hasilnya menunjukkan bawa pembentuk kualitas sinergi adalah rasa saling percaya, sedangkan rasa saling percaya itu dapat tumbuh dalam kelompok yang memiliki kebersamaan visi yang tinggi. Kebersamaan visi itu dilandasi oleh nilai-nilai yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai pembelajaran serta nilai-nilai inovatif, yang kesemuanya menunjukkan nilai-nilai yang mampu menghasilkan kinerja yang bermutu tinggi, dan dirasakan oleh para anggotanya bahwa hasilnya melampaui perkiraan anggota kelompok itu sendiri. Kebersamaan nilai-nilai dan visi itu selanjutnya menjadi landasan untuk rasa saling percaya, yang selanjutnya mendukung terwujudnya kualitas sinergi. Mengingat bahwa rasa saling percaya itu begitu penting artinya sebagai hasil dari uji statistik yang dilakukan dalam elaborasi ini, maka penting sekali untuk meneliti lebih jauh tentang anteseden dari terbentuknya rasa saling percaya selain kebersamaan visi, yang memaparkan tentang adanya perbedaan sebab timbulnya rasa saling percaya yang bersifat afektif dan kognitif sejalan dengan perbedaan budaya kerja yang bersifat kolektif dan individualistik.

Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi apa yang menjadi sebab dari tumbuhnya rasa saling percaya, khususnya dalam kondisi budaya kerja yang kolektivistik, dan juga untuk memaknai arti kebersamaan visi dipandang dari budaya kolektivistik di mana penelitian ini dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Mardiana, A. (2021). Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(2), 149-158.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1), 68–84.
- Lestari, B., & Pardimin, P. (2019). Manajemen kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(1), 113-113
- Sulasmi, S. (2009). Peran variabel perilaku belajar inovatif, intensitas kerjasama kelompok, kebersamaan visi dan rasa saling percaya dalam membentuk kualitas sinergi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 13(2), 219-237.
- Supriatna, E. (2023). Inisiatif partisipasi sosial dalam mengatasi anak putus sekolah: Studi kasus pada jaringan kerja dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1828-1848
- Kirana, Cintantya Adhita Dara, dan Rike Anggun Artisa. 2020. “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu.” *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 6(1):68–84. doi: 10.26618/kjap.v6i1.3119.
- Komariah, Kokom, Evi Novianti, Hanny Hafiar, dan Ari Agung Prastowo. 2018. “Sinergi Pemerintah Dan Perusahaan Pada Aktivitas Csr Dalam Rangka Menghadapi Mea.” *Jurnal Kawistara* 7(2):168. doi: 10.22146/kawistara.27525.
- Maulana, Syahrial. 2019. “Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha

- Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional.” *ResearchGate* 1(4):6.
- Moh. Rafli Abbas, Reni Shintasari. 2016. “Difabel, LSM dan Politik Intermediary.” *Jurnal Society* VI:15–26.
- Nursamsiyah, N. 2022. “Pendampingan Pemerintah Desa Oleh Lembaga Strategi Nasional Sebagai LSM Dalam Pengembangan Desa Wisata.”
- Rachman, M. Aulia, dan Syamsuddin Syamsuddin. 2018. “Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal.” *Proceeding of Community Development* 1:135. doi: 10.30874/comdev.2017.18.
- Rusyadi, Yedi, Ipah Ema Jumiati, dan Rina Yulianti. 2022. “Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Kerangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 6(2):45–55. doi: 10.56945/jkpd.v6i2.193.
- Sandi, Santi. 2022. “E-ISSN : 2798-2580 Universitas Buana Perjuangan Karawang.” *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP)* Ke-2 (April 2020):1299–1309.
- Satibi, Iwan, Ediyanto Ediyanto, dan Regan Vaugan. 2023. “Konstruksi Konsep Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengadaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat).” *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14(1):33–46. doi: 10.23969/kebijakan.v14i1.5855.
- Supriadi, Endang, Ghufron Ajib, dan Sugiarto Sugiarto. 2020. “Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi.” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4(1):53–72. doi: 10.21580/jsw.2020.4.1.4544.
- Wahyuni, RR. E. Anggraeni Eksi. 2014. “Sinergi Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1):69–104.
- Sandi, S. (2022). E-ISSN : 2798-2580 Universitas Buana Perjuangan Karawang. *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-2, April 2020, 1299–1309.*
- Komariah, K., Novianti, E., Hafiar, H., & Prastowo, A. A. (2018). Sinergi

- Pemerintah Dan Perusahaan Pada Aktivitas Csr Dalam Rangka Menghadapi Mea. *Jurnal Kawistara*, 7(2), 168. <https://doi.org/10.22146/kawistara.27525>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Kirana, Cintantya Adhita Dara, dan Rike Anggun Artisa. 2020. “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu.” *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 6(1):68–84. doi: 10.26618/kjap.v6i1.3119.
- Komariah, Kokom, Evi Novianti, Hanny Hafiar, dan Ari Agung Prastowo. 2018. “Sinergi Pemerintah Dan Perusahaan Pada Aktivitas Csr Dalam Rangka Menghadapi Mea.” *Jurnal Kawistara* 7(2):168. doi: 10.22146/kawistara.27525.
- Maulana, Syahrial. 2019. “Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional.” *ResearchGate* 1(4):6.
- Moh. Rafli Abbas, Reni Shintasari. 2016. “Difabel, LSM dan Politik Intermediary.” *Jurnal Society* VI:15–26.
- Nursamsiyah, N. 2022. “Pendampingan Pemerintah Desa Oleh Lembaga Strategi Nasional Sebagai LSM Dalam Pengembangan Desa Wisata.”
- Rachman, M. Aulia, dan Syamsuddin Syamsuddin. 2018. “Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal.” *Proceeding of Community Development* 1:135. doi: 10.30874/comdev.2017.18.
- Rusyadi, Yedi, Ipah Ema Jumiati, dan Rina Yulianti. 2022. “Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Kerangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 6(2):45–55. doi: 10.56945/jkpd.v6i2.193.
- Sandi, Santi. 2022. “E-ISSN : 2798-2580 Universitas Buana Perjuangan Karawang.” *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-2* (April 2020):1299–1309.

- Satibi, Iwan, Ediyanto Ediyanto, dan Regan Vaugan. 2023. "Konstruksi Konsep Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengadaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat)." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14(1):33–46. doi: 10.23969/kebijakan.v14i1.5855.
- Supriadi, Endang, Ghufroon Ajib, dan Sugiarto Sugiarto. 2020. "Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4(1):53–72. doi: 10.21580/jsw.2020.4.1.4544.
- Wahyuni, RR. E. Anggraeni Eksi. 2014. "Sinergi Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1):69–104.
- Satibi, I., Ediyanto, E., & Vaugan, R. (2023). Konstruksi Konsep Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengadaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 33–46.
- <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>
- Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarto, S. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(1), 53–72. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544>
- Nursamsiyah, N. (2022). *Pendampingan Pemerintah Desa Oleh Lembaga Strategi Nasional Sebagai LSM Dalam Pengembangan Desa Wisata*. <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1788> %0A[http://repo.apmd.ac.id/1788/1/NURSAMSİYAH 18520185.pdf](http://repo.apmd.ac.id/1788/1/NURSAMSİYAH%20185.pdf)